

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya atau dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011).

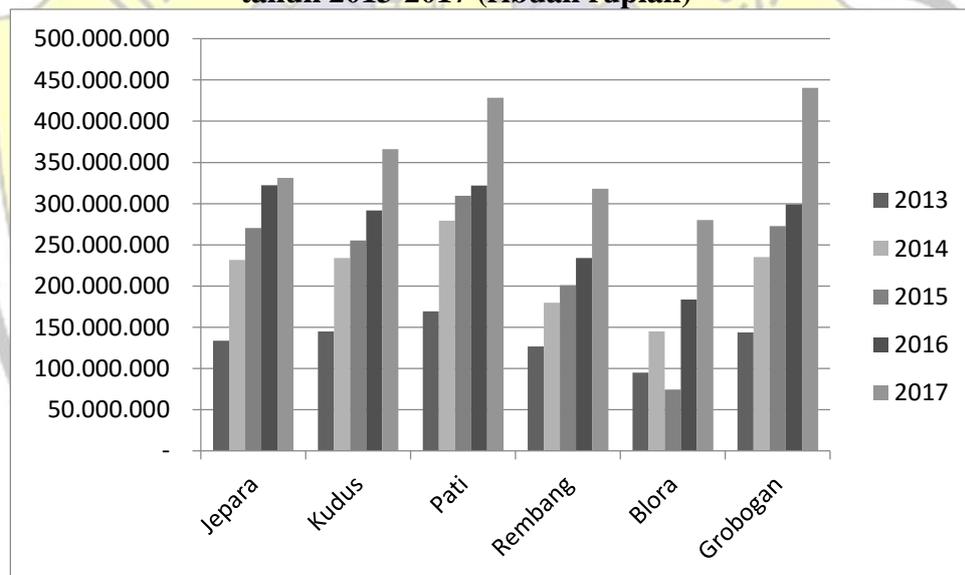
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab nyata pada pemerintah daerah secara proporsional. Dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara transparan. Kriteria keberhasilan pelaksanaan sistem ini adalah tertampungnya aspirasi semua warga dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan.

Kemandirian keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah. Dengan begitu daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di dalam peraturan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli

Daerah (PAD) bersumber dari hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah. Hal itu bertujuan untuk memberikan jalan kepada daerah untuk mendapatkan pendanaan, hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta pelaksanaannya. Pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pati tahun 2013-2017 :

Gambar 1.1
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pati tahun 2013-2017 (ribuan rupiah)



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Dalam gambar 1.1 menunjukkan fenomena yaitu adanya perbedaan pendapatan yang diterima setiap Kabupaten/Kota dan pada setiap tahunnya memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Dari enam Kabupaten/Kota yang ada di wilayah administrasi Eks-Karesidenan Pati pada tahun 2017 yang memiliki

kontribusi terbesar Kabupaten Grobogan 440 miliar rupiah kemudian diikuti oleh Kabupaten Pati 428 miliar rupiah. Apabila dilihat dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tersebut pendapatan daerah setiap Kabupaten/Kota mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari enam Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pati mencapai 2,17 Triliun Rupiah. Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto. Sumber dana yang didapatkan pemerintah diharapkan dapat membiayai penyelenggara kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah dapat menggali sumber dana yang ada dalam wilayahnya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin banyak kebutuhan yang dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin tinggi kualitas ekonomi daerah, sehingga dapat dikatakan mandiri dalam bidang keuangan daerah dan semakin menurun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Dalam pendapatan asli daerah tidak hanya pajak daerah dan retribusi daerah saja yang dibutuhkan dalam peningkatan kesejahteraan daerah, tetapi juga pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini tentunya belum semua daerah (kabupaten/kota) memilikinya, hanya daerah (kabupaten/kota) dengan sumber daya alam memadai yang bisa menjadi penunjang pendapatan asli daerah lainnya. Oleh

karena itu, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diharapkan mampu menambah jumlah PAD pada daerah terkait, sehingga dengan begitu, daerah mampu mempertanggungjawabkan penyerahan wewenang tersebut dan mampu menjadi daerah yang mandiri dimana tanpa meminta bantuan dari bagian pemerintah pusat. Selain demikian, otonomi daerah di Indonesia, bukan hanya diukur dari jumlah pendapatan asli daerah yang dicapai, tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat berperan dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB) juga merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah ketika jumlah penduduk meningkat maka semakin banyak pula masyarakat yang berbelanja, dengan banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga menyebabkan perkembangan usaha semakin besar dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah semakin tinggi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi pada wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahu. Ketika PDRB mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan meningkat.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil penelitian Apriani, dkk (2017) serta penelitian Nuzulistyan (2017) menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangganya, sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Inkonsistensi hasil penelitian ditemukan pada hasil penelitian Nuzulistyan, dkk. (2016) dan Suharyadi, dkk (2018) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun dalam penelitian Apriani, dkk. (2017) menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD atau hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil penelitian Apriani, dkk (2017) menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, akan tetapi penelitian yang

dilakukan oleh Suharyadi, dkk (2018) menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Apabila suatu daerah memiliki penduduk yang banyak maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Asmuruf, dkk (2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Akan tetapi, penelitian Juliansyah dan Sulkadria (2018) menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pendapatan total yang diperoleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang dimiliki asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Hasil penelitian Ariyani (2018) menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, dkk (2015) variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Apriani, dkk. (2017) yang meneliti mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada

variabel, objek penelitian, dan periode penelitian. Jika penelitian terdahulu hanya menggunakan empat variabel yaitu penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maka penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perbedaan kedua pada objek penelitian, penelitian terdahulu adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Salatiga, maka objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pati. Perbedaan selanjutnya adalah pada periode penelitian terdahulu tahun 2012-2016, maka dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2017.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA EKS-KARESIDENAN PATI TAHUN ANGGARAN 2013-2017”**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian dan kemungkinan tersedianya data serta nantinya agar masalah tidak melebar dan tidak

menyimpang dari masalah yang akan di bahas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti yaitu penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan asli daerah.
2. Penelitian dengan mengambil data statistik keuangan daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berisi laporan realisasi penerimaan pendapatan kabupaten/kota, naskah publikasi jumlah penduduk serta PDRB pada periode tahun 2013-2017.
3. Jangka waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan

1.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

5. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
6. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
7. Apakah penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dijabarkan diatas maka tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk menguji pengaruh pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk menguji pengaruh penerimaan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah.

6. Untuk menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait secara langsung di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah Eks-Karesidenan Pati

Penelitian ini dapat membantu memberikan masukan dan pertimbangan instansi, selain itu dapat memberikan gambaran bagi instansi dalam membuat strategi yang baik dan terarah untuk mengelola instansi yang akan datang secara efektif dan efisien

